

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Bank Dunia (2021), Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau serta mempunyai beragam kelompok etnis. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan menempati posisi keempat di dunia serta masuk dalam urutan kesepuluh dunia dengan ekonomi terbesar. Selain itu Indonesia juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang konsisten.

Dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi tentu didukung dengan perencanaan pembangunan yang baik. Rencana pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan rencana pembangunan dengan jangka waktu panjang yang dimulai tahun 2005-2025. Rencana pembangunan tersebut dibagi menjadi dua yaitu rencana jangka menengah 5 tahun atau yang disebut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan hal utama yang menjadi prioritas dari pembangunan nasional tersebut berbeda-beda (Bank Dunia, 2021).

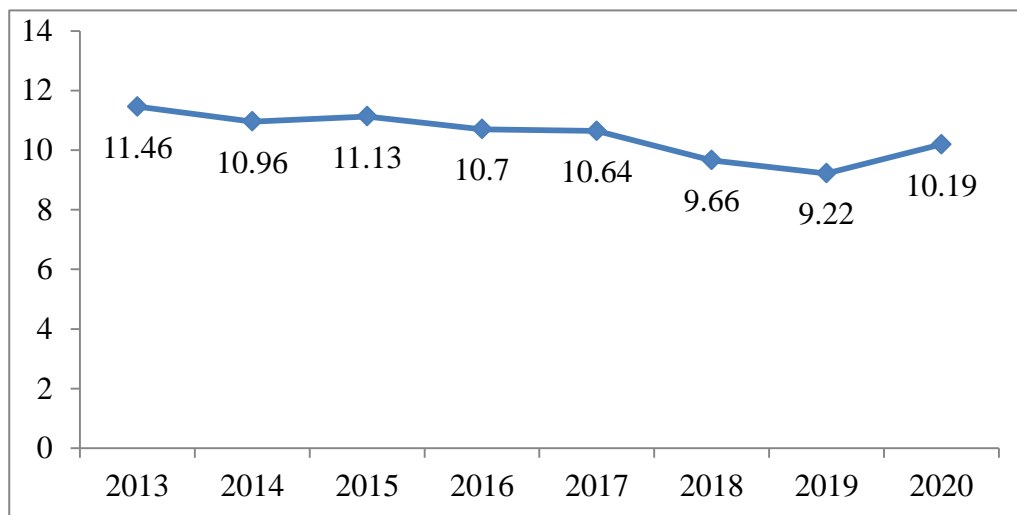
Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memakmurkan kehidupan masyarakat (Aningtyas *et al*, 2015). Pembangunan dilakukan untuk mencapai suatu kemakmuran serta kesejahteraan yang dilaksanakan melalui pengembangan perekonomian sebagai upaya mengatasi masalah dalam pembangunan itu sendiri terutama kemiskinan (Yacoub, 2012). Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya negara agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Pembangunan nasional terus dilaksanakan disemua negara baik di negara maju ataupun negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan (Solikatun *et al*, 2014). Pembangunan seharusnya mampu menghasilkan *output* yang lebih baik yang bisa diukur dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik agar bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam sebuah negara khususnya masalah kemiskinan (Yacoub, 2012).

Tujuan utama dari pembangunan nasional yaitu menjadikan negara itu makmur serta ingin masyarakatnya hidup aman dan sejahtera (Azizah *et al*, 2018). Sedangkan tujuan pembangunan nasional di negara Indonesia sudah ada didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencapai kesejahteraan umum adalah tujuan utama bagi suatu bangsa (Solikatun *et al*, 2014). Kesejahteraan umum adalah suatu keadaan masyarakat yang baik, dimana masyarakat hidup dalam keadaan sehat, adil dan makmur. Di Indonesia kesejahteraan umum selalu dikaitkan dengan kemiskinan. Oleh karena itu, semakin tinggi kesejahteraan umum suatu masyarakat maka semakin rendah tingkat kemiskinan yang ada begitupun sebaliknya (Solikatun *et al*, 2014).

Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang selalu terjadi dari masa ke masa dan menjadi perhatian utama, karena kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesenjangan dimasyarakat dimana ada perbandingan antara si kaya dan si miskin (Ishartono & Raharjo, 2016). Segala upaya pembangunan terus digencarkan oleh pemerintah baik diperkotaan ataupun didaerah hal ini dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan tapi faktanya masalah ini belum terselesaikan secara tuntas khususnya di negara yang berkembang seperti di Indonesia (Azizah *et al*, 2018).

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar dan masalah yang sulit untuk diatasi di seluruh negara yang ada didunia termasuk di Indonesia. Kemiskinan merupakan fenomena, yang belum dan juga tidak akan terhapuskan dari muka bumi ini. Hal ini karena, kemiskinan memiliki sifat yang kompleks artinya kemiskinan yang ada tidak muncul sendiri secara tiba-tiba akan tetapi dipengaruhi oleh berbagai latar belakang yang ada (Parwa & Yasa, 2019). Istilah kemiskinan ada ketika masyarakat tidak bisa mencukupi tingkat kemakmuran ekonominya sesuai dengan standart hidup tertentu (Azizah *et al*, 2018). Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB, tentu dituntut agar bisa mencapai target yang sudah ditetapkan dalam deklarasi *Sustainable Development Gols* (SDGs).

Tujuan dari SDGs adalah mencapai tujuan bersama yang universal yang fokus pada masalah pembangunan yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial. Untuk bisa menjaga keseimbangan tiga masalah tersebut maka SDGs mempunyai lima pilar utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan juga kemitraan agar bisa mencapai tiga tujuan yang harus tercapai pada tahun 2030 meliputi memberantas kemiskinan, mencapai kesejahteraan serta mengatasi perubahan iklim. Pengukuran tingkat kemiskinan antara negara satu dengan negara lainnya berbeda hal ini karena dipengaruhi perbedaan standart kehidupan serta kondisi sosial (Ishartono & Raharjo, 2016). Berikut adalah presentase kemiskinan yang ada di Indonesia tahun 2013-2020 :



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Gambar 1. Presentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013-2020

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa presentase angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia tahun 2013-2019 cukup mengalami penurunan, tentu hal ini terjadi karena adanya kemajuan dari pembangunan yang ada meskipun belum maksimal. Dan di tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0,97 persen dari tahun 2019. Adanya kenaikan pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid-19, pandemi ini muncul pertama kali pada akhir tahun 2019 tepatnya di kota Wuhan, China. Pada Maret 2020 pandemi Covid-19 mulai memasuki negara Indonesia, banyak orang yang terinfeksi virus ini serta jumlahnya terus meningkat dan wilayah sebarannya semakin meluas, sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional

non alam. Pandemi covid-19 ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa karena mempengaruhi semua sektor yang ada. Apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bahkan *lockdown* terhadap beberapa wilayah yang ada di Indonesia termasuk perkantoran, pusat perbelanjaan dan sejumlah bisnis lainnya. Kondisi ini tentu akan menekan perekonomian, sehingga perekonomian menjadi lemah, banyak orang terkena phk, dan pada akhirnya perekonomian melambat sehingga mengakibatkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi (Tarigan *et al*, 2020). Pandemi covid-19 ini mengakibatkan jutaan penduduk menjadi miskin, karena kekurangan sumber daya kesehatan, sanitasi, dan kepadatan penduduk yang menyebabkan penularan virus ini menjadi meningkat, sehingga banyak masyarakat yang masuk ke lingkaran setan kemiskinan (Anser *et al*, 2020).

Meskipun kemiskinan tidak akan terhapuskan, akan tetapi bukan berarti bahwa kemiskinan dibiarkan begitu saja, hal ini karena kemiskinan dapat menimbulkan berbagai kejahatan sosial. Menurunkan kemiskinan adalah tujuan utama dari seluruh negara yang ada didunia terutama di negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia (Ramdani, 2015). Menurut Girsang (2011), dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan Multidimensional Di Pulau-Pulau Kecil” mengatakan bahwa menurunkan angka kemiskinan adalah suatu hal yang tidak mudah karena memerlukan waktu yang cukup lama, umumnya diberbagai negara angka kemiskinan hanya bisa turun kurang dari 2 persen per tahun. Menurunkan angka kemiskinan tidak bisa *instan* akan tetapi harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, bertahap serta membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik lokal, nasional bahkan internasional. Berbagai kajian sudah dilakukan untuk mengelompokkan masyarakat miskin dan juga mengetahui penyebab dari kemiskinan tapi hal tersebut belum terselesaikan dengan baik, hal ini disebabkan karena pertama kemiskinan disebabkan karena berbagai kondisi serta bersifat multidimensional, kedua data masyarakat miskin tidak akurat sehingga sulit untuk membuat kebijakan yang tepat (Wangke, 2010).

Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai kebijakan program untuk mengatasi kemiskinan (Ramdani, 2015). Berbagai program yang sudah dilakukan untuk mengurangi masalah kemiskinan yang ada seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Tabungan Kesejahteraan Rakyat Kredit Usaha, Program Penanggulangan Dampak Kritis Ekonomi, serta Jaringan Pengaman Sosial Di Bidang Kesehatan, yang kemudian dilanjutkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah, serta Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan. Semua program kebijakan yang sudah dilaksanakan nyatanya belum menunjukkan hasil yang maksimal (Solikatun *et al*, 2014). Untuk menurunkan serta mengatasi angka kemiskinan salah satu hal yang harus diperhatikan adalah harus dilakukan secara bersama serta terperinci dan tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah dari berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut agar nantinya bisa terarah secara langsung pada faktor yang berkaitan erat dengan kemiskinan (Annur, 2013).

Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan adalah rendahnya pendidikan. Pendidikan adalah suatu jalan bagi negara untuk maju. Hal ini karena, pendidikan berkaitan dengan karakter pembangunan serta pertahanan diri masyarakat dalam suatu bangsa. Oleh sebab itu, maka pendidikan suatu masyarakat harus tinggi untuk mencapai kemakmuran dalam hidupnya, karena dengan pendidikan yang rendah maka menyebabkan kemampuan seseorang dalam mengembangkan dirinya terbatas serta sulit untuk bersaing didunia kerja yang rata-rata tingkat pendidikan adalah prioritas utama dalam dunia kerja (Azizah *et al*, 2018). Selain itu, pendidikan adalah salah satu pilar dalam memperkuat modal manusia untuk suatu pembangunan ekonomi dan merupakan investasi jangka panjang.

Menurut Bank Dunia (1990), dalam laporannya dihadapan PBB menjelaskan bahwa aspek pendidikan adalah aspek terpenting dalam pembangunan manusia selain aspek ekonomi, karena aspek pendidikan akan meningkatkan kehidupan ekonominya. Pendidikan merupakan faktor yang berkaitan erat dengan kemiskinan, karena pendidikan adalah suatu modal serta

upaya untuk meningkatkan kualitas dan juga produktivitas sumber daya manusia.

Menurut Sachs (2005), dalam bukunya yang berjudul *The End of Proverty* mengatakan bahwa salah satu upaya pengentasan kemiskinan adalah pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan yang baik maka setiap orang pasti mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang baik juga. Maka dari itu pendidikan bisa memutus rantai kemiskinan yang nantinya bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi untuk keluarga miskin masalah pendidikan belum diperhatikan secara serius, jika anak-anak pergi sekolah maka keluarga miskin akan kehilangan pendapatan, karena keluarga miskin mempekerjakan anak untuk memperoleh pendapatan. Melihat fenomena tersebut tentu sangat memprihatinkan apalagi yang terjadi dikota besar (Ustama, 2009). Tentu pemerintah harus terus berupaya dalam meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada, serta membuat kebijakan tertentu untuk masyarakat miskin agar bisa memberikan kemudahan dalam menempuh pendidikan terutama didaerah terpencil dan juga pemerintah harus meningkatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, suatu negara harus mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang merata dan adil agar nantinya masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Menurut Suahasil (2007), menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi memiliki kaitan dengan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mewujudkan pendidikan yang lebih tinggi, hal ini berhubungan dengan biaya pendidikan yang ada semakin mahal, meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai macam program kebijakan pendidikan khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu tapi biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan masih terbilang tinggi.

Selain pendidikan, faktor lain yang di duga mempengaruhi kemiskinan dan menjadi pilar utama dalam memperkuat modal manusia selain pendidikan adalah kesehatan. Kesehatan adalah salah satu pengaruh terbesar dari sebuah kemiskinan. Kesehatan adalah suatu investasi dalam meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk menjadikan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hidup dalam

kemiskinan akan mengakibatkan masyarakat hidup dilingkungan yang buruk serta tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kesehatan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan masyarakat miskin rentan terkena penyakit (Suryawati, 2005). Akibat dari kemiskinannya itu menyebabkan masyarakat miskin yang sudah terkena penyakit dan kemudian jatuh sakit maka mereka tidak bisa membayar biaya perawatan yang ada. Hal ini karena, masyarakat miskin hanya mementingkan bagaimana masyarakat bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari tanpa mementingkan kesehatannya. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya (Pribakti, 2018)

Adanya derajat kesehatan yang baik dan juga memadai tentu harus ditunjang dengan adanya fasilitas kesehatan serta akses sanitasi yang baik dan juga layak. Sanitasi merupakan faktor yang cukup berpengaruh dalam kemiskinan, hal ini dikarenakan sanitasi berhubungan dengan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap kesehatan (Raharyanti, 2013). Menurut *World Health Organisation* (2004), sanitasi yang buruk akan menyebabkan kesejahteraan manusia berkurang, perkembangan sosial dan ekonomi serta pendidikan juga akan hilang. Akan tetapi pembangunan sanitasi yang ada di Indonesia masih rendah, karena disebabkan pada minimnya pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang rendah masyarakat akan lebih mementingkan kebutuhan dasarnya sehingga pembangunan bidang sanitasi tidak dipedulikan. Menurut Rizki (2007), menjelaskan bahwa pembangunan sanitasi yang baik bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan indikator yang diukur adalah angka harapan hidup, kematian bayi serta angka penyakit yang disebabkan oleh kualitas air. Selain itu pemerintah juga harus mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk lebih mengerti betapa pentingnya akses sanitasi yang layak sehingga permasalahan lingkungan lainnya bisa menjadi lebih baik lagi (Raharyanti, 2013).

Banyaknya rata-rata jumlah anggota keluarga juga akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka akan menyebabkan kondisi menjadi semakin miskin (Sa'diyah & Arianti,

2012). Hal ini disebabkan karena biaya hidup yang harus ditanggung lebih tinggi dan juga tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh. Menurut Mantra (2003), menjelaskan bahwa jumlah anggota keluarga adalah semua anggota keluarga yang berada dalam satu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah serta makan dari satu dapur dengan kelompok penduduk yang sudah termasuk dalam kelompok tenaga kerja. Makin banyak jumlah anggota keluarga maka akan semakin banyak juga pendapatan yang dikeluarkan, sehingga menyebabkan keluarga miskin tidak memiliki tabungan dengan tidak adanya tabungan tentu akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan, sanitasi yang nantinya akan berpengaruh ke produktivitas dan menyebabkan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah (Putri *et al*, 2019)

Dalam pandangan masyarakat miskin, ketika suatu rumah tangga mempunyai jumlah anggota keluarga yang banyak maka akan menyebabkan suatu rumah tangga semakin miskin (Suprianto *et al*, 2018). Menurut Rivani (2003), banyaknya jumlah tanggungan keluarga karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu jumlah anak yang terlalu banyak, adanya anggota rumah tangga yang sudah lanjut usia serta susah untuk mencari pekerjaan bagi anggota yang sudah lanjut usia, tentu dengan hal seperti itu maka akan menambah jumlah tanggungan yang ada. Kebanyakan rumah tangga miskin akan mempunyai jumlah anggota keluarga lebih banyak daripada rumah tangga yang tidak miskin.

Berdasarkan penelitian diatas, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah jumlah fasilitas pendidikan, jumlah fasilitas kesehatan, sanitasi dan rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga terhadap kemiskinan di Indonesia, oleh karena itu penelitian ini perlu untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020?

2. Apakah kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020?
3. Apakah sanitasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020?
4. Apakah banyaknya rata-rata jumlah anggota per rumah tangga berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah yang dibahas tidak terlalu luas serta agar penelitian ini bisa terarah dan juga jelas. Maka dari itu peneliti akan membatasi variabel yang akan diidentifikasi sebagai berikut yaitu :

1. Variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini berupa variabel kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan juga banyaknya rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga.
2. Penelitian yang dilakukan yaitu fokus kepada masalah kemiskinan serta variabel mempengaruhi yang ada di Indonesia (34 provinsi) periode 2013-2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020.
2. Menganalisis pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020.
3. Menganalisis pengaruh sanitasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020.
4. Menganalisis pengaruh banyaknya rata-rata anggota keluarga per rumah tangga terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2020.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa membuktikan apakah teori lingkaran kemiskinan dapat diputus dengan variabel yang ada dipenelitian ini (fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sanitasi dan banyaknya rata-rata anggota

keluarga per rumah tangga). Dengan adanya variabel kesehatan dan pendidikan dalam penelitian ini, diharapkan bisa memutus rantai kemiskinan di bagian produktivitas. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan modal manusia untuk meningkatkan produktivitas yang nantinya bisa dijadikan sebagai acuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang kemiskinan dan bagi masyarakat yang ingin keluar dari kemiskinan harus bisa meningkatkan kualitas produktivitasnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan ke pemerintah tentang faktor yang mempengaruhi kemiskinan serta menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dan juga program untuk menanggulangi masalah kemiskinan.

c. Bagi BKKBN

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan untuk mengatasi jumlah penduduk khususnya jumlah anggota keluarga dalam suatu rumah tangga yang terus meningkat dari tahun ke tahun.